

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
MULTISTAKEHOLDER PENDIDIKAN**

Umi Arifah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

Email: umiarifah87@gmail.com



Abstrak

Manajemen dalam suatu lembaga pendidikan harus dijalankan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan hidup lembaga pendidikan tersebut. Salah satu komponen yang dapat mengembangkan sebuah lembaga pendidikan tersebut adanya pengelolaan sistem informasi dengan baik. Pengelolaan sistem informasi ini dilaksanakan untuk Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah, keluarga dan masyarakat dengan harapan mewujudkan tujuan pendidikan. Fakta dilapangan masih banyak para pengelola pendidikan yang belum mengaplikasikan sistem informasi manajemen yang berdampak pada kurang optimal lembaga pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi. Dengan pengelolaan yang tidak dilandasi ilmu manajemen akan mempengaruhi proses dan hasil yang tidak efektif dan efisien sehingga lembaga pendidikan mengalami kemunduran. Permasalahan pendidikan yang terjadi dapat dihadapi melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Manajemen, Pendidikan Islam, Multistakeholder Pendidikan*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meneruskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menjadi penolong dan memperbaiki perdaban umat manusia. Era baru dalam dunia pendidikan memiliki tantangan yang lebih besar untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang semakin baik. Salah satu tantangan terbesar yaitu mempertahankan dan mengembangkan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat global. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan menjadikan kualitas pendidikan harus semakin ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan tidak memudar.

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut mendukung pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa.¹

Upaya peningkatan kualitas pendidikan ini dilihat dengan berkembangnya suatu lembaga dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang mendukung untuk pengelolaan atau manajemen yang baik, salah satunya yaitu dengan pengelolaan sistem informasi secara tepat dan cepat dalam lembaga pendidikan.

Pengelolaan suatu informasi dalam institusi atau lembaga pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan itu sendiri. Informasi yang dikelola dengan baik hendaknya berada dalam suatu sistem pengelolaan informasi. Semua fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan dapat berhasil dilaksanakan apabila ditopang oleh suatu sistem yang menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Informasi yang dikelola dengan tepat sangat diperlukan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian. Melalui informasi yang akurat inilah seorang manajer atau penanggung jawab pendidikan mampu mewujudkan tujuan pendidikan.²

Namun masih banyak para pengelola lembaga pendidikan yang belum menjalankan sistem informasi manajemen ini, walaupun mereka sudah mengetahui sistem tersebut sehingga perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini tidak dapat diikuti

¹ E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.17.

² Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

dengan baik. Pengelolaan pendidikan yang kurang maksimal berdampak pada *output* pendidikan yang kurang maksimal.

Minimnya pengelolaan dan penggunaan secara maksimal informasi yang diperlukan membuat para pengelola dan pengguna jasa pendidikan menghadapi banyak kendala. Wajar saja jika akhirnya ini menyebabkan banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia. Kurangnya perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian, khususnya dalam Pendidikan Nasional termasuk Pendidikan Islam, membuat krisis berkepanjangan di lingkungan pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan (beriman dan bertakwa) yang belum tercapai, krisis moral yang tiada henti, pendidikan yang tidak mengindahkan tuntutan atau harapan masyarakat (lulusan yang berilmu dan memiliki keterampilan sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera), kebijakan pendidikan yang belum merata, problem manajemen, krisis kepemimpinan, minimnya sumber daya manusia (SDM) handal, krisis finansial, hingga problem kelembagaan pendidikan.

Muncul beberapa permasalahan dalam pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pertama, Krisis Moral. Konsepsi moralitas bangsa Indonesia harus berdasarkan atas nilai-nilai dan budaya yang diyakini masyarakatnya. Oleh karena itu konsep moralitas yang direncanakan harus berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan agama. Konsepsi moralitas disini tentang tindakan yang benar dan baik berasaskan agama Islam. Dekadensi moral atau kemerosotan moral dikalangan pelajar baik dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sungguh sangat mengkhawatirkan.

Sejatinya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan mandat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa "*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*".³

³Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:2003).

Melihat kondisi yang saat ini terjadi dimana pendidikan dianggap belum memenuhi harapan masyarakat dan masih belum bisa menghadapi tantangan dan tuntutan zaman. Karena pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, global dan nasional.

Kedua, permasalahan pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Pendidikan sebagai suatu sistem berarti pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Maka, dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak menjadi satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga tidak heran jika setiap warga negara apapun profesinya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Ketiga, Permasalahan Kebijakan Pendidikan. Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran diantaranya, (1) standar dan pengembangan kurikulum; (2) visi, misi, penetapan tujuan dan target pendidikan; (3) rekrutmen dan pembinaan tenaga kependidikan; (4) pengelolaan dan pembinaan kesiswaan; (5) penyediaan buku pelajaran; (6) penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan; (7) penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran; (8) pengadaan, perawatan, dan penggunaan perpustakaan dan laboratorium sekolah; dan sebagainya yang dapat memberi dukungan pada kualitas pembelajaran. Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen institusi pendidikan diantaranya yaitu: (1) pengalokasian sumber-sumber anggaran dan penggunaannya, (2) pengelolaan gedung, (3) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (4) pengelolaan fasilitas dan sebagainya.

Keempat, Problem Manajemen. Banyak sekolah atau madrasah yang ada di Indonesia dikelola dengan manajemen apa adanya saja atau yang sudah biasa dijalankan. Tidak ada upaya melakukan perbaikan kualitas sesuai dengan mandat Standar Nasional Pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang diwujudkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Kelima, krisis kepemimpinan. Banyak sumber daya manusia yang berpotensi besar menjadi pemimpin dalam suatu lembaga, namun yang memiliki kriteria cerdas dan bermoral

baik itulah yang tidak gampang untuk ditemukan. Karena banyak orang yang memiliki pengetahuan luas, kemampuan menejerial baik, tetapi terkendala dengan kasus moral yang kurang baik baik terkait kasus korupsi atau affair.

Keenam, minimnya sumber daya manusia yang handal. Terkait sumber daya manusia yang handal bukan hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas yang berdampak pada minat masyarakat untuk mau menggunakan jasa lembaga pendidikan yang ada. Dengan sumber daya manusia yang handal diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan mewujudkan tujuan pendidikan lembaga tersebut.

Ketujuh, krisis finansial. Pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya harus konsisten dari perencanaan yang sudah disusun sehingga dapat implementasinya tidak menyimpang dan sesuai dengan yang diharapkan. Maka prosesnya harus menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas publiknya tinggi.

Kedelapan, kelembagaan pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud dalam konteks ini adalah sekolah, keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali dan utama bagi anak. Dalam keluarga anak mulai dikenalkan dengan berbagai nilai-nilai (norma), keyakinan (agama), pengetahuan, dan interaksi hubungan sosial.⁴

Dengan berbagai permasalahan yang muncul terkait pendidikan tersebut cara yang dilakukan untuk mengatasinya dengan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik melalui lembaga pendidikan yang formal, non formal ataupun informal yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan Islam yang diterapkan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

B. Sistem Informasi Manajemen

1. Sistem

Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti: (1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan demikian, kata *systema* berarti himpunan bagian atau komponen yang saling

⁴Helmawati, *ibid.*, hlm. 3-10.

berhubungan secara teratur yang merupakan satu keseluruhan, sehingga pada suatu sistem terdapat beberapa sistem kecil (*secondary system, subsystem*). Oleh karena itu, sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen, relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang satu dan lainnya saling terkait atau saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi.⁵

Selain pengertian sistem diatas, ada beberapa pengertian sistem menurut beberapa ahli, dengan mengutip dari Eti Rochaety pengertian sistem sebagai berikut:

- a. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu (Ludwig, 1997).
- b. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan (A. Rapoport, 1997).
- c. Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi (L.Ackof, 1997).
- d. Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan (Gordon B. Davis, 1995).
- e. Sistem yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan (Raymond McLeod, 2001).
- f. Ryans (1998) *System it any identifiable, assemblage of element (object, person, activities, information record, etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as an organizational entity generating an observable (or sometimes merely inferable) product.*
- g. William A. Shorde (1995) dalam bukunya *Organization and Management* menyebutkan ada sekitar enam ciri sebuah sistem, yaitu perilaku berdasarkan tujuan tertentu, keseluruhan, keterbukaan, terjadi transformasi, terjadi korelasi, memiliki mekanisme kontrol artinya terdapat kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan sistem yang bersangkutan.

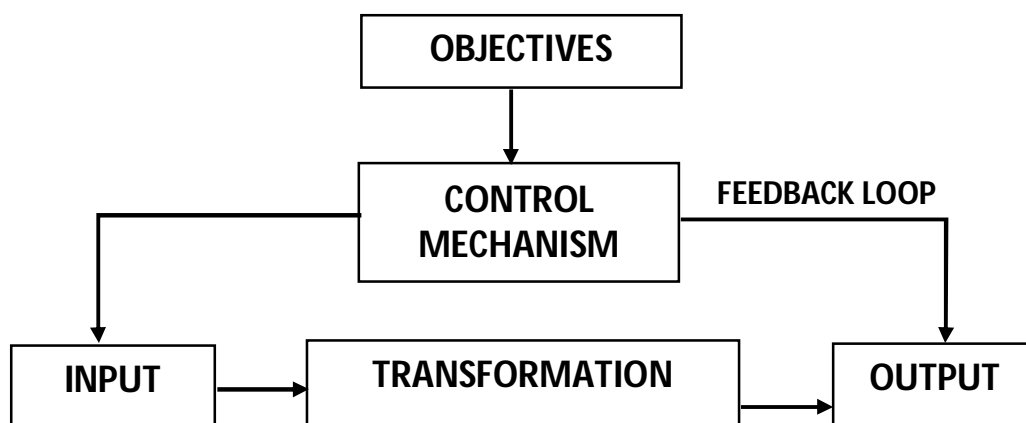
⁵Helmawati, *Ibid.*, hlm.14.

h. Budi Sutedjo (2002) sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.

Jenis sistem secara umum terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup (*Open-Loop and Closed-Loop System*). Sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Sedangkan sistem yang tertutup, yaitu sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik (Rayamond Mc Leod, Jr., 2001). Kedua jenis sistem tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 *Open-Loop System (Sistem Terbuka)*



Gambar 1.2 *Closed-Loop System (Sistem Tertutup)*⁶

2. Infomasi

Ada beberapa definisi informasi menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang (Gordon B. Davis, 1995).

⁶ Ety Rochaety, dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 2-3.

- b. Informasi menurut Budi Sutedjo (2002: 168) merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada.
- c. Informasi, yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa (suatu objek atau konsep) sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya (Samuel Elion, 1992).

3. Manajemen

Secara umum dikatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya (Goerge R. Terry, 1997).

Definisi lain menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan antar anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stoner AF, 1998).

Pada dasarnya dalam proses penggunaan sistem informasi, seorang manajer sebelumnya harus memahami posisi dari hierarki/tingkatan manajemen dimana dia berada. Sumber informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer atau pimpinan lembaga pendidikan yang menduduki posisi paling atas cenderung lebih banyak dari luar organisasi/lembaga pendidikan tersebut. Semakin rendah tingkat manajerial seseorang maka lebih banyak dibutuhkan sumber informasi dari internal organisasi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, pimpinan lembaga pendidikan yang menduduki posisi top manajemen semakin banyak untuk mencari sumber informasi dari eksternal organisasi. Hal ini diperlukan untuk pengembangan organisasi, komparasi dengan lembaga pendidikan yang ada, mencari strategi baru untuk inovasi demi peningkatan kapabilitas organisasi. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang dipimpinnya

memiliki daya saing yang tinggi untuk mempertahankan eksistensi di masa mendatang.⁷

4. Sistem Informasi Manajemen

Stoner (1996) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Sistem tersebut menyediakan informasi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, masa kini, dan proyeksi masa yang akan datang, disamping informasi mengenai peristiwa-peristiwa relevan yang terjadi di dalam dan diluar organisasi tersebut.⁸

C. Pendidikan Islam

1. Pendidikan

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hak tersebut mendudukan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa.⁹Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian manusia. Dengan pendidikan inilah manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.

John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Menurut *Dictionary of Education* (dalam Ara Hidayat dan Imam Machali) disebutkan bahwa, pendidikan adalah (1) keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk

⁷ Ety Rochaety, *ibid.*, hlm.5.

⁸Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 21-22.

⁹E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 17.

tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat dimana mereka hidup. (2) proses sosial dimana orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.¹⁰

Dalam perspektif ke-Indonesiaan pengertian, fungsi dan tujuan pendidikan terumuskan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 yaitu:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.¹¹

Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bertanggungjawab, berwibawa dan memiliki peran aktif jika didalamnya terdapat tenaga-tenaga kependidikan khususnya tenaga pendidik yang memiliki rasa tanggung-jawab yang tinggi, profesional dibidangnya serta memiliki lekatan nilai-nilai moral untuk dapat diakui guru yang berwajah dan berwibawa.¹²

2. Pendidikan Islam

Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat ahli pendidikan islam dalam mengartikan Pendidikan Islam, antara lain:

¹⁰Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan* (Yogyakarta:Kaukaba,2012), hlm. 20.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:2003).

¹² Muwahid Shulhan, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 98.

- a. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar di pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹³
- b. Muhammad Quthb memberi pengertian pendidikan Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Idi, sebagai usaha untuk melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam melaksanakan kegiatannya di bumi ini.¹⁴
- c. Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan Islam adalah sikap pembentukan manusia yang lainnya berupa perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk agama Islam.¹⁵
- d. Menurut Hasan Langgulung, Pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasil di akhirat.¹⁶
- e. Menurut Konferensi Pendidikan Islam se-dunia yang ke-2 (1980), Pendidikan Islam harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Sedangkan tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah, baik pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan secara luas.¹⁷

D. Multistakeholder Pendidikan

Pendidikan yang merupakan modal bagi kesejahteraan dan kebahagiaan di kemudian hari harus diterapkan oleh beberapa pihak dalam pendidikan, diantaranya:

¹³ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm. 19.

¹⁴ Abdullah Idi, Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 47-48.

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 25.

¹⁶ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm. 94.

¹⁷ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28.

1. Pendidikan Informal

Pendidikan informal yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki tanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Dengan adanya informasi yang diperoleh sejak dini maka orang tua dapat merencanakan pendidikan anak-anaknya, yang setidaknya dapat membantu anak-anaknya menjadi manusia yang akan berperilaku sesuai perintah Tuhannya, dan akan berguna tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain yang akan beruntung di dunia dan akhirat.

Pendidikan oleh orang tua ini membantu anak-anak mengetahui informasi tentang lembaga pendidikan, ruang lingkup pendidikan yang akan membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki anak-anak, ataupun informasi tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Dan melalui informasi ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang tua dalam melakukan evaluasi dan penilaian dalam pendidikan yang nantinya bisa menjadi tolak ukur atas kemajuan pengembangan potensi anak.

2. Pendidikan Formal

Di lingkup pendidikan formal sebagai penanggung jawab adalah kepala sekolah/madrasah yang dalam menjalankan kinerjanya memerlukan adanya informasi yang akan digunakan dalam menyusun perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang disusun haruslah mengacu pada standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain kepala sekolah/madrasah, guru merupakan penanggung jawab utama dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar dan mengajar sebelumnya harus menyusun perencanaan pembelajaran terlebih dahulu dengan tujuan memudahkan dalam memantau keberhasilan pencapaian dalam kelas.

3. Pendidikan Nonformal

Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 26, dinyatakan dalam beberapa pasal diantaranya:

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Melihat dari beberapa pasal diatas dalam pendidikan nonformal banyak pihak yang bisa terlibat didalamnya untuk menjadi bagian dari stakeholder pendidikan pada jalur nonformal.

E. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam oleh Multistakeholder Pendidikan

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyediakan informasi akurat bagi suatu manajemen, terutama bagi pimpinan pada suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu pemimpin dalam lembaga pendidikan ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari hendaknya menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut pimpinan memerlukan informasi yang tepat, akurat, cepat, dan relevan sehingga tujuan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu, agar informasi yang diperlukan sesuai dengan harapan dan mampu mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, perlu dikelola dalam suatu sistem yaitu sistem informasi manajemen pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu modal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Untuk mendapatkan output pendidikan sesuai dengan harapan, maka perlu

adanya perencanaan yang baik dan tepat. Agar pendidikan bisa menjadi modal untuk kesejahteraan pada masa yang akan datang, pendidikan perlu direncanakan dengan baik, yang dapat di dilaksanakan melalui:

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Keluarga (Informal)

Informasi untuk pendidikan dalam keluarga memiliki beberapa manfaat, diantaranya: (a) menambah pengetahuan bagi setiap anggota keluarga terutama orangtua, (b) mengurangi ketidakpastian terutama pada saat akan membuat perencanaan atau pengambilan keputusan pendidikan, (c) memberikan standar, patokan, aturan, atau ukuran dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya memberikan standar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan, (d) mengurangi resiko kegagalan.

Melalui informasi yang relevan dan tepat (efektif), pendidikan dalam keluarga akan tercapai secara maksimal. Pengembangan potensi yang tepat akan dapat membantu manusia menjadi manusia yang manusiawi. Melalui informasi yang dimiliki, orangtua sebagai penanggungjawab pertama dan utama pendidikan anak akan mampu menggali secara seimbang seluruh potensi yang dimiliki baik itu potensi jasmani, potensi spiritual (rohani) dan juga potensi akal. Keseimbangan tumbuh kembang potensi-potensi ini disinyalir akan membuat manusia menjadi manusia yang manusiawi dan unggul. Sayangnya, banyak sekali informasi yang diperoleh dari media cetak, elektronik, maupun informasi tentang keluarga yang beragama Islam tetapi tidak berperilaku Islami. Banyaknya kasus KDRT, penyelewengan hingga perceraian sudah tidak dapat dihitung lagi. Begitu pula dengan anak-anak yang berperilaku tidak sesuai rencana (tujuan) pendidikan. Pendidikan yang tidak tepat yang diperoleh dari keluarga membuat banyak permasalahan setiap anggota keluarga itu sendiri, terlebih anak-anak.

Agar tujuan pendidikan dalam keluarga dapat terwujud, ayah atau ibu perlu membuat perencanaan program pendidikan. Perencanaan pendidikan dalam keluarga dapat dirancang dalam beberapa program, diantaranya :

a) Perencanaan Pemilihan Pasangan Hidup

Keluarga yang ideal hendaknya diawali dari pernikahan yang sah dan diakui. Dalam membentuk sebuah keluarga yang diikat dalam perkawinan yang sah dan diakui hendaknya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, baik syarat dalam agama maupun dalam hukum negara. Pasangan hidup yang menikah dengan memenuhi syarat-syarat sesuai perintah agama dan hukum negara akan berdampak baik bagi semua pihak. Keluarga yang keberadaannya diterima baik oleh Allah maupun oleh negara dan masyarakat tentu akan merasa tenteram. Jika setiap anggotanya memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujudlah keluarga yang ideal (sehat dan bahagia).

Helmawati (2015) menyampaikan, sebagai keluarga ideal setidaknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

3. Sebuah keluarga dikatakan keluarga jika diikat dalam perkawinan atau pernikahan.
4. Perkawinan harus sah menurut agama dan hukum negara.
5. Menikah harus dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama.
6. Memiliki anggota yang lengkap (ayah, ibu, dan anak).
7. Sebuah keluarga mengharapkan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan perkawinan.
8. Setiap pasangan satu sama lain harus saling mengenal.
9. Pasangan hidup bersama dan satu sama lain harus saling menyayangi sehingga ada ikatan batin.
10. Setiap anggota hendaknya menciptakan dan merasakan hidup tenteram dan bahagia.
11. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing.
12. Saling menghormati hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.
13. Dalam keluarga dibuat pembagian tugas kerja sesuai dengan porsinya.
14. Memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga.
15. Komunikasi lancar dalam keluarga.

16. Perlu ada bimbingan dan pembinaan, serta pengawasan dalam keluarga.¹⁸

Sebuah keluarga tidak akan pernah menjadi keluarga ideal jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan terutama oleh agama dan hukum yang berlaku di negara dan masyarakat. Diperlukan adanya sebuah perencanaan pembentukan keluarga dengan memperhatikan beberapa persyaratan untuk memudahkan orangtua dalam mendidik anak bersama-sama sehingga tujuan pendidikan dalam keluarga tercapai.

b) Perencanaan Pola Asuh Anak dan Komunikasi dalam Keluarga

Mengutip pada Helmawati (2015), pola asuh orangtua terhadap anak bisa dilakukan dengan beberapa macam, diantaranya:

(1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter biasanya pola komunikasi yang dilakukan adalah satu arah, yang biasanya segala aturan orangtua harus ditaati anak-anaknya. Sehingga orangtua lebih memaksakan pendapat ataupun keinginan kepada anak tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Bahkan anak tidak memiliki peluang untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, dirasakan ataupun yang diinginkan anak tersebut.

Segi positif dari pola asuh ini yaitu anak menjadi penurut dan cenderung akan menjadi disiplin yakni mentaati peraturan yang ditetapkan orangtua. Namun mungkin saja anak tersebut hanya mau menunjukkan disiplinnya dihadapan orangtua, padahal dalam hatinya anak membangkang, sehingga ketika berada di belakang orangtua anak akan bertindak lain. Kalau ini terjadi, maka perilaku yang dilakukannya hanya untuk menyenangkan hati orangtua atau untuk menghindari dirinya dari hukuman. Perilaku ini akhirnya membuat anak memiliki dua kepribadian yang bukan merupakan refleksi kepribadian sesungguhnya.

(2) Pola Asuh Permisif

¹⁸ Helmawati, *Ibid.*, hlm.56-58.

Dalam pola asuh permisif ini yang digunakan komunikasi satu arah, sehingga anak memiliki kesempatan untuk memutuskan apa yang diinginkan sendiri terlepas dari orangtua setuju ataupun tidak. Apa yang menjadi keinginan anak cenderung akan dituruti dan diperbolehkan oleh orangtuanya. Dampak negatif dari pola ini kurangnya sikap disiplin anak pada aturan sosial yang berlaku dimasyarakat. Namun disamping dampak negatif, pola ini juga memiliki dampak positif yaitu adanya rasa tanggungjawab anak karena kepercayaan penuh dari orangtua sehingga sering muncul kreatifitas, inovasi dan kemandirian anak.

(3) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis menekankan komunikasi dua arah antara anak dan orangtua sehingga anak juga diberikan tanggungjawab namun masih dalam pengawasan orangtua. Terdapat sisi positif dari pola ini yaitu anak akan menjadi individu yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, percaya kepada orang lain dan menjadi pribadi yang jujur.

(4) Pola Asuh Situasional

Pola asuh model ini merupakan model yang penerapannya bisa menggunakan beberapa pola asuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pola asuh ini lebih fleksibel karena dalam bisa dilaksanakan beberapa pola sekaligus untuk mengatasi beberapa kondisi yang dihadapi, harapannya dengan pola asuh ini juga untuk memberikan pola asuh yang baik dan berdampak positif terhadap anak.

c) Perencanaan Proses Pendidikan Islam dalam Keluarga

Dalam setiap proses pendidikan dalam keluarga diharapkan bisa berhasil dengan baik, maka orangtua mengetahui prinsip-prinsip dalam mendidik anak. Prinsip-prinsip dalam mendidik anak yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- (1) Prinsip Menyeluruh
- (2) Prinsip Keseimbangan dan Kesederhanaan
- (3) Prinsip Kejelasan

- (4) Prinsip Tidak Ada Pertentangan
- (5) Prinsip Realistis dan Dapat Dilaksanakan
- (6) Prinsip Perubahan yang diinginkan
- (7) Prinsip Menjaga Perbedaan-Perbedaan Perseorangan
- (8) Prinsip Dinamis

2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah/Madrasah (Formal)

Lembaga pendidikan formal dalam pelaksanaan proses pendidikan harus menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan yaitu tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang didalamnya memuat beberapa komponen, diantaranya: a) Standar Isi; b) Standar Proses; c) Standar Kompetensi Lulusan; d) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g) Standar Pembiayaan; h) Standar Penilaian. Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Dalam lembaga pendidikan formal Sistem Informasi Manajemen dimanfaatkan dan diterapkan oleh beberapa stakeholder didalamnya, diantaranya:

a) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam bagi Kepala Sekolah/Madrasah

Sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan sebaiknya dalam menyusun perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian disesuaikan dengan informasi yang relevan dan akurat berdasarkan standar nasional pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia serta sumber daya alam di lembaga tersebut. Penyusunan program dan kegiatan dibuat adanya skala prioritas sehingga kepala sekolah/madrasah mampu mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mewujudkan efektif dan efisiensi kinerja.

Setelah perencanaan dan prioritas kegiatan tersebut disusun, maka kepala sekolah/madrasah dapat memusatkan perhatian kepada kinerja guru dan stafnya untuk memenuhi ketentuan standar pendidikan di lembaga yang dipimpinnya dan untuk mencapainya diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengendalian atau pengawasan pada seluruh kegiatan dalam lingkungan pendidikan yang berada dalam tanggung jawabnya. Pengendalian dilakukan agar seluruh proses kegiatan pendidikan dalam lembaga tersebut berjalan sesuai rencana yang telah diprogramkan sebelumnya.

b) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam bagi Guru

Guru merupakan orang tua kedua bagi anak dalam mengemban amanah dalam membantu anak menggali potensi yang dimiliki anak sehingga anak memiliki ilmu pengetahuan, kepribadian dan keterampilan yang baik. Maka dalam menjalankan tugasnya tersebut guru perlu membutuhkan informasi dari siswa yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, minat, bakat dan prestasi dari peserta didik.

Informasi pada tahapan awal adalah data siswa yang diperoleh pada saat siswa mendaftarkan pada sekolah tersebut, sehingga pihak sekolah seharusnya menyimpan dan mengelola data tersebut dengan baik oleh bagian staf administrasi. Data tersebut akan diolah sebagai informasi guru untuk membantu peserta didik secara optimal dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Dengan informasi yang baik dapat membantu pihak-pihak yang memerlukan untuk melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian.

Misalnya dalam perencanaan program pembelajaran maka dapat diaplikasikan saat penyusunan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Silabus bermanfaat sebagai pedoman untuk pengembangan pembelajaran lebih lanjut, misalnya dalam membuat rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian.

Sedangkan RPP menjadi standar pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

c) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam bagi Staf Administrasi

Staf administrasi merupakan bagian dalam sistem pendidikan yang berfungsi membantu pengelolaan administrasi seluruh kegiatan pendidikan. Staf administrasi akan mengumpulkan data, mengelola, menyimpan, menggandakan, dan membantu pihak-pihak yang memerlukan data atau informasi untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian terutama bagi kepala sekolah/madrasah, para pendidik termasuk juga orangtua.

3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam di Masyarakat (Nonformal)

Masyarakat merupakan laboratorium dan sumber informasi dari pelaksanaan proses pendidikan, untuk itu setiap anggota masyarakat memiliki peran dan tanggungjawab terhadap terlaksananya proses pendidikan, sehingga pendidikan harus mengakumulasi seluruh potensi dan nilai kebudayaan masyarakat dalam sistem pendidikan.

Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberi arahan terhadap pendidikan anak, terutama terhadap pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, kelompok sepermainan, kelompok kelas dan sekolahnya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga kota dan warga negara. Dengan demikian, dipundak mereka terpikul keikutsertaan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berarti bahwa pemimpin dan penguasa di masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebab tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan

maupun sebagai kelompok sosial. Tanggung jawab ini ditinjau dari segi ajaran Islam, secara implisit mengandung pula tanggung jawab dalam hal pendidikan.

Zakiyah mengutip Al-Syaibani mengemukakan bahwa diantara ulama-ulama mutakhir yang telah meyakini persoalan tanggung jawab adalah Abbas Mahmud Al-Akkad yang menganggap rasa tanggung jawab sebagai salah satu ciri pokok bagi manusia. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bertanggung jawab. Allah SWT berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala (amal) mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”* (Q.S. At-Tur : 21).¹⁹

Semua manusia memiliki tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan melarang yang munkar. Maka sudah sangat jelas bahwa tanggung jawab seseorang tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga kepada orang lain di masyarakat pada umumnya.

Untuk membuat suatu perencanaan pendidikan, masyarakat memerlukan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan, karena dengan adanya informasi ini akan membantu masyarakat. Maka dari itu dalam menetapkan pendidikan dalam masyarakat, para penanggung jawab pendidikan di masyarakat khususnya orang tua perlu mengetahui tujuan pendidikan, setelah itu barulah merencanakan komponen pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dengan adanya pendidikan masyarakat berharap anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang baik, berakhlak mulia dan memiliki keterampilan sehingga mereka akan mudah dalam mencari pekerjaan nantinya. Dalam masyarakat yang perlu memperoleh pendidikan bukanlah hanya anak-anak namun para orang dewasa pun memerlukan pendidikan sehingga dapat dikatakan sebagai pendidikan seumur hidup.

Masyarakat pada umumnya akan memilih lembaga pendidikan nonformal yang tidak memerlukan biaya besar, serta waktunya fleksibel. Yang menjadi

¹⁹ Helmawati, *Ibid.*, hlm.148.

tujuan utamanya mereka tetap memperoleh ilmu pengetahuan yang diperlukannya dan untuk ilmu pengetahuan keagamaan yang akan mengarahkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Disamping itu yang bersifat duniawi, masyarakat juga memerlukan ilmu pengetahuan tentang pendidikan, kesehatan, gizi, pengelolaan keuangan yang baik agar hidup sejahtera baik dunia dan akhirat.

Agar lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya pengawasan yang bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga pendidikan tersebut akan memberikan kontribusi yang baik bagi pengguna dan seluruh komponen pendidikan.

F. Kesimpulan

Sistem Informasi Manajemen merupakan bagian dari ilmu manajemen yang didalamnya menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi atau lembaga termasuk lembaga pendidikan. Agar tercipta keberhasilan dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut yang harus dilaksanakan adalah menerapkan sistem informasi yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan para pengelola lembaga terkait.

Ada beberapa kriteria informasi yang baik dan bermanfaat diantaranya informasi yang telah diolah dan dianalisis, memiliki arti dan bermanfaat bagi penggunanya. Karena setiap orang memerlukan informasi, semakin akurat informasi maka semakin tinggi mutunya dan semakin aman pengguna dapat menggunakannya dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, informasi dapat membantu penggunanya untuk membuat perencanaan dan program kerja, pengambilan keputusan dan pengendalian. Informasi juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dimiliki, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan, dan memberi standar, aturan, ukuran, keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Ara, dan Imam Machali. 2012. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Langgulung, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al Maarif.
- Marimba, Ahmad D. 1980. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al Maarif.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rochaety, Ety, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shulhan, Muwahid. 2004. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Ilmu.